

## ANALISIS FAKTOR KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH PERDESAAN DI KABUPATEN BULELENG

Gede Suharjono<sup>1</sup>, N. Budiarta R. M<sup>2</sup>, Mayun Nadiasa<sup>3</sup>

**Abstrak** : Penyediaan air bersih di Kabupaten Buleleng ditangani oleh Sistem PDAM dan Sistem Swakelola Masyarakat dalam bentuk lembaga Unit Pengelola Sarana atau Kelompok Pengelola Sarana (UPS/KPS). Dari jumlah 148 desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng, hanya 68 desa/kelurahan yang sudah mendapat pelayanan air bersih PDAM, sedangkan 80 desa melalui sistem swakelola masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan tahun 2010 - 2011 kinerja UPS/KPS cenderung menurun. Penurunan kinerja UPS/KPS akan berdampak pada terganggunya fungsi penyediaan air bersih bagi masyarakat perdesaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Pengelola Sarana/Kelompok Pengelola Sarana (UPS/KPS) Air Bersih di Kabupaten Buleleng dalam penyediaan air bersih perdesaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sampel yang diambil sebanyak 67 desa dari 80 desa pengelola air bersih perdesaan. Responden terdiri atas satu responden dari aparat desa sebagai pembina SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di desa, dua responden dari pengelola UPS/KPS dan tiga responden dari masyarakat pemanfaat langsung/pelanggan. Variabel yang diambil berdasarkan pengukuran kinerja sektor publik yaitu aspek masukan, aspek proses, aspek keluaran, aspek hasil dan aspek dampak. Data dari responden diolah dengan analisis deskriptif dan analisis faktor.

Hasil analisis faktor menunjukkan ada lima faktor paling dominan yang mempengaruhi kinerja UPS/KPS yaitu debit sumber air, kemampuan masyarakat membayar, kesadaran masyarakat membayar, kualitas pelayanan dan kemudahan mengakses pembiayaan.

Kata kunci: Penyediaan air bersih perdesaan, swakelola masyarakat, UPS/KPS, kinerja

## ANALYSIS PERFORMANCE FACTOR RURAL WATER MANAGEMENT IN BULELENG REGENCY

**Abstract:** Provision of water supply in Buleleng regency handled by local water supply enterprise (PDAM) systems and swakelola systems which is done by the society in Facility Manager Unit/Facility Manager Community (UPS/KPS). Of the total 148 villages in Buleleng regency, only 68 villages have got PDAM systems, while 80 villages through a swakelola system by society. Based on the observations of the year 2010-2011 performance UPS/KPS tends to decrease. Performance degradation UPS/KPS will impact the disruption of the function of providing water to rural communities.

The objective of this research is to knowing the factors that influenced the performance of Facility Manager Unit/Facility Manager Community (UPS/KPS) in supplying a rural water supply. This research used purposive sampling technique in which the subject of this research was taken from 67 of 80 village as a rural clean water manager. The respondent consist of ; one respondent from the apparatus in the village as a builder of SPAM (Drinking Water Supply System) in the village. Two respondents from the manager of UPS/KPS and there respondents from the society or customers. The variable data is based on the measurement performance in public sector that consist of; input aspect, process aspect, output aspect, outcomes aspect and impact aspect. The data from responses will manage by using descriptive analysis and also factor analysis. The result of factor analysis showed that there was five dominant factor that influenced the performance of UPS/KPS ; water spring debit, public willingness to pay, public awareness to pay, quality of service and ease of access to finance.

Keywords: Rural water supply, swakelola by societ, UPS/KPS, performance

<sup>1</sup> Alumnus Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Udayana

<sup>2</sup> Staf Pengajar Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Udayana

<sup>3</sup> Staf Pengajar Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Udayana

## PENDAHULUAN

Sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Buleleng ditangani oleh Sistem PDAM dan Sistem Swakelola Masyarakat dalam bentuk lembaga Unit Pengelola Sarana atau Kelompok Pengelola Sarana (UPS/KPS) di tingkat desa/kelompok. Dari jumlah 148 desa/kelurahan, 68 desa/kelurahan sudah mendapat pelayanan air bersih PDAM dengan tingkat pelayanan 28,37%, sedangkan 80 desa/kelurahan melalui UPS/KPS ditingkat desa/kelompok dengan prosentase pelayanan 42,01%. Dan sekitar 29,62% masih menggunakan sistem non perpipaan tidak terlindungi (DPU Kab. Buleleng, 2011)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), ditegaskan bahwa penyelenggara (pengelola) SPAM dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD/PDAM, Koperasi, Badan Usaha Swasta (BUS) dan Masyarakat Pengelola Air minum. Oleh karena itu pengelolaan air bersih perdesaan melalui UPS/KPS ditingkat desa/kelompok masyarakat telah diakui dan wajib dikelola secara mandiri untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air bersih bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil pengamatan dari tahun 2008-2011 kinerja pengelolaan air bersih perdesaan di Kabupaten Buleleng melalui UPS/KPS cenderung menurun. Hal ini diakibatkan banyaknya permasalahan yang dihadapi pengelola seperti makin sering terjadi pergiliran pendistribusian air bersih ke masyarakat, pemakaian air bersih masyarakat yang kurang efisien, pemahaman masyarakat tentang air bersih tidak mendukung pengembangan air bersih, persepsi masyarakat yang keliru masih menganggap bahwa air bersih adalah benda sosial, belum jelasnya legalitas kelembagaan UPS/KPS, pengelola UPS/KPS belum bisa bekerja optimal karena rendahnya pendapatan, minimnya SDM (sumber daya manusia) pengelola UPS/KPS, serta minimnya komitmen aparat desa dalam peningkatan kinerja UPS/KPS.

Dampak dari menurunnya kinerja UPS/KPS adalah terganggunya fungsi penyediaan air bersih di desa setempat, dapat menimbulkan konflik antar kelompok/antar desa, menurunnya derajat kesehatan masyarakat, sarana prasarana air bersih yang telah terbangun tidak terkelola dengan baik dan

akan makin sulit merealisasikan target *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015. Target MDGs pada tahun 2015 diharapkan 75% penduduk Provinsi Bali sudah dapat mengakses pelayanan air minum yang layak (DPU Provinsi Bali, 2010).

Melihat permasalahan yang terjadi dalam penyediaan air bersih perdesaan di Kabupaten Buleleng, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPS/KPS yang hasilnya dapat memberikan kontribusi pemecahan masalah guna pembenahan UPS/KPS dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat setempat yang memenuhi 3 aspek pelayanan yaitu kuantitas, kualitas dan kontinuitas dan guna mendukung pencapaian target MDGs tahun 2015.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kebijakan Pembangunan Air Minum

Tujuan pembangunan sektor air minum adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan air minum yang berkelanjutan. Berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya dan kegiatan penyediaan air minum yang dilakukan untuk memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat secara terus-menerus.

### Dasar Kebijakan Pembangunan Air Minum

Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani Deklarasi Milenium dan karenanya sepakat untuk mengikat diri mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) di tahun 2015. Nilai strategis MDGs bagi Indonesia sebagai pemicu (*wake up call*) karena Indonesia harus berjuang keras untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih baik. Upaya percepatan pencapaian MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi perencanaan program dan anggaran baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyediaan air minum ada pada tujuan ke 7 (tujuh) *Millenium Development Goals* (MDGs) MDGs target C yaitu menurunkan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman, layak dan berkelanjutan serta sanitasi dasar pada 2015. Indikator pencapaian pelayanan air minum secara nasional yaitu memenuhi kebutuhan air minum layak sebesar 68,87% hingga tahun 2015. Sedangkan untuk target Provinsi Bali pada tahun 2015 diharapkan 75% penduduk

sudah dapat mengakses pelayanan air minum yang layak (DPU Provinsi Bali, 2010).

#### Dasar Kebijakan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat

- a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 40 Butir (4) ;  
“Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum”
- b) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasal 65 ;  
“Koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri”
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM Pasal 3 ayat (2) ;  
Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- d) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng.

#### Kesinambungan/Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan

Menurut Narayan (1993) dalam Waspola (2008), kesinambungan sebagai sebuah kapasitas untuk melakukan pemeliharaan sarana dan manfaat yang dilakukan baik ditingkat masyarakat maupun agency tanpa mengganggu lingkungan, sekalipun bimbingan dari program sudah usai. Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) lebih difokuskan pada tujuan jangka panjang, pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang.

#### Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang non profit oriented. Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti non profit. Anggapan tersebut

kurang tepat, karena organisasi sektor publik ada yang bersifat *quasi non profit* yaitu organisasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus agar terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan organisasi pendapatan ke negara atau daerah (Mahsun, 2012).

#### Metode Penilaian Kinerja

Menurut Mahsun (2012), bahwa seluruh aktivitas organisasi harus diukur agar dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi, pengukuran dapat dilakukan terhadap masukan (*input*) dari program organisasi yang lebih ditekankan pada keluaran (*output*), proses, hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari program organisasi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan organisasi yang meliputi penetapan indikator kinerja dan penentuan hasil capaian indikator kinerja.

#### Jenis Indikator Kinerja Pemerintah

##### Aspek Masukan/*Input*

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, yang diukur adalah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material, waktu, teknologi dan masukan lainnya (Mahsun, 2012).

##### Aspek Proses/*Process*

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. (Mahsun, 2012).

##### Aspek Keluaran/*Output*

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik (Mahsun, 2012).

##### Aspek Hasil/*Outcomes*

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) (Mahsun, 2012).

##### Aspek Manfaat/*Benefit*

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Manfaat baru tampak setelah

beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang (Mahsun, 2012).

#### Aspek Dampak/Impact

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif (Mahsun, 2012). Dalam beberapa literatur manfaat dan dampak cukup disebut dampak/*impact*. Pengukuran dampak dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil program dengan prakiraan keadaan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada.

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Pengamatan langsung dilakukan ke desa-desa yang mengelola air bersih secara swakelola melalui UPS/KPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan penyebaran kuisioner ke *stakeholders* pengelolaan air bersih perdesaan.

#### Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu penentuan responden sebagai sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil sebanyak 67 desa dari 80 desa pengelola air bersih perdesaan. Responden terdiri atas 1(satu) responden dari Aparat Desa sebagai pembina Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di desa, 2(dua) responden dari Pengelola UPS/KPS dan 3(tiga) responden dari Masyarakat pemanfaat langsung / Konsumen.

#### Variabel Penelitian

Variabel yang diambil berdasarkan Pengukuran Kinerja Sektor Publik yaitu Aspek Masukan (*input*), Aspek Proses (*proses*), Aspek Keluaran (*output*), Aspek Manfaat (*outcome*) dan Aspek Dampak (*benefit-impact*) dapat dilihat pada Tabel 1. Indikator penelitian didapatkan dari penelitian sebelumnya dan beberapa indikator baru (\*) hasil kajian dari pengamatan dan wawancara dengan *stakeholders* air bersih perdesaan.

#### Analisis Data

Analisis faktor untuk merangkum informasi yang terkandung dalam banyak variabel menjadi hanya beberapa faktor agar mudah diatur (*manageable*) dan memudahkan untuk pengambilan kesimpulan yang jelas serta tidak meragukan. Hasil analisis adalah faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja unit pengelola air bersih perdesaan.

Analisis faktor pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 18.0.

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### Profil Responden

Prosentase tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah berpendidikan SMA yaitu sebanyak 267 orang atau 66,58% dari responden, sedangkan yang berpendidikan SMP sebanyak 54 orang atau 13,47% dari responden. Dan yang berpendidikan SD sebanyak 40 orang atau 9,98%, untuk responden berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 35 orang atau 8,73%.

Berdasarkan tingkat penghasilan dalam 1(satu) bulan, responden dominan berpenghasilan antara Rp.500.000 – Rp.1.000.000, sebanyak 155 orang atau 38,65%, sedangkan yang berpenghasilan diatas Rp.1000.000 sebanyak 120 orang atau 29,93%. Responden berpenghasilan antara Rp.250.000-Rp.500.000 sebanyak 79 orang atau 19,70% dan sebanyak 47 responden berpenghasilan dibawah Rp.250.000.

#### Uji Validitas dan Reabilitas

Hasil Uji validitas dengan program SPSS versi 18.0 seluruh pernyataan penelitian valid atau sah, dan untuk uji reliabilitas terhadap data yang mempengaruhi kinerja UPS/KPS diperoleh nilai alpha lebih besar dari r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPS/KPS adalah reliabel.

#### Uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)

Untuk masing-masing aspek uji KMO semuanya lebih besar dari 0,5 maka data bisa untuk dianalisis lebih lanjut.

#### Uji Barlett

Uji Barlett bertujuan untuk menunjukkan apakah tiap variabel mempunyai nilai korelasi yang besar dengan variabel yang lainnya atau tidak. Dari uji ini semua data didapatkan tingkat signifikan semua aspek sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa terdapat korelasi antar variabel.

#### Korelasi Anti Image

Hasil nilai MSA untuk variabel dari seluruh aspek semua diatas 0,5 maka tidak ada variabel yang tereduksi.

Tabel 1. Variabel Penelitian

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	REFERENSI
INPUT	Kelembagaan	SK Pengelola Air Bersih Anggaran Dasar/Anggaran RT	
	Pendanaan	Bantuan PS air bersih dari pemerintah	
		Biaya Penyambungan baru	
		Tarif air	
		Uang Beban pelanggan	
	Sumber Daya	Jumlah Pengelola	
	Manusia	Tingkat Pendidikan Pengelola	
		Pengalaman Pengelola	
		Keahlian Pengelola	
		Komitmen & Motivasi Pengelola	
		Kekompakan Pengelola	
	Peralatan/ infrastruktur	Penghasilan/Gaji Pengelola	
		Prasarana & Sarana air bersih terbangun	
Umur jaringan air bersih			
Kelengkapan sarana distribusi (valve, WM, dll)			
Sumber air	Fasilitas kerja/kantor		
	Prosedur kerja		
	Debit air sumber air		
Teknologi	Kualitas air	Poernomo, (2011)	
	Kontinuitas sumber air		
Penyediaan Air	Pemompaan		
	Gravitasi		
Kebijakan	Pemompaan - Gravitasi		
	Situasi politik desa		
	Pelatihan Managemen BUMDES dari Pemerintah		
PROCESS	Penanganan Masalah	Dukungan Aparat desa dinas/adat	
		Jumlah	
		Sebab	
	Peningkatan pelayanan	Kecepatan	
		Perluasan cakupan pelayanan	
		Rehabilitasi jaringan	
		Rehabilitasi reservoir	
	Organisasi	Penambahan sumber air baru	
		Kemauan masyarakat membayar tagihan	
		Kemampuan masyarakat membayar tagihan	
Pemerintah Desa	Belum adanya sangsi/denda		
	Kepedulian aparatur desa		
	Komitmen aparatur desa		
OUTPUT	Administrasi	Partisipasi apartur desa	
		Akuntabilitas/Pertanggungjawaban ke desa	
		Tertib laporan ke pemerintah daerah	
	Pelayanan	Peningkatan Jumlah Pelanggan	
		Terpenuhinya kebutuhan air bersih	
Pendapatan	Peningkatan Kontinuitas air mengalir		
	Peningkatan Pendapatan UPS/KPS		
	Kontribusi pendapatan ke Desa Dinas/Adat		
OUTCOMES	Kesadaran masyarakat membayar tagihan air	Kualitas pelayanan	
		Kepuasan konsumen	
	Tanggap kebutuhan masyarakat	Berkurangnya masyarakat rawan air	
		Terbentuknya UPS sehat dan handal	
IMPACT	Kemudahan UPS/KPS dalam mengakses pembiayaan	Perubahan perilaku masyrkt hidup bersih dan sehat	

Sumber : Hasil Kompilasi Data

**Analisis Faktor Aspek Masukan**

Berdasarkan hasil analisis faktor sesuai Tabel 2. terlihat bahwa faktor satu (faktor paling dominan) terbentuk dari lima

komponen variabel dengan total varians sebesar 17,787% dan nilai *eigen* sebesar 4,802.

**Tabel 2. Hasil Analisis Faktor Aspek Masukan**

No. Faktor	Komponen Faktor 1	Muatan Faktor	Eigen Value	Variance Explained	Comulative Total
Faktor 1	Debit sumber air	0,829	4,802	17,787	17,787
	Komitmen dan motivasi pengelola	0,721			
	Tarif air	0,647			
	AD/ART pengelola	0,631			
	Dukungan aparat desa dinas/adat	0,612			

Sumber : Hasil Analisis 2012

Dari hasil analisis faktor didapatkan komponen variabel yang membentuk faktor paling dominan adalah sebagai berikut :

- 1) Debit sumber air;
- 2) Komitmen dan motivasi pengelola;
- 3) Tarif air;
- 4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- 5) Dukungan aparat desa dinas/adat;

Debit sumber air merupakan variabel yang paling dominan dalam menentukan faktor satu. Permasalahan penurunan debit sumber air dihadapi sebagaimana besar UPS/KPS di Kabupaten Buleleng. Salah satu penyebabnya adalah perubahan vegetasi/fungsi lahan. Beberapa UPS/KPS sudah punya kesadaran untuk menjaga fungsi lahan dengan mempertahankan vegetasi asli namun terkendala kepemilikan lahan karena sumber air berada di tanah milik. Umumnya karena alasan ekonomi pemilik tanah mengganti vegetasi asli dengan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti cengkeh, kopi dll. Hal ini merupakan salah satu penyebab penurunan debit air.

Permasalahan kedua yang sering dihadapi UPS/KPS apabila akan menambah debit air dengan mengambil sumber air baru terkendala pada ijin pemanfaatan karena alternatif sumber air berada pada tanah milik perorangan. Hal inilah yang sering menghambat UPS/KPS dalam mengakses program bantuan penambahan debit dari Pemerintah. Dengan adanya keterbatasan debit sumber air yang dimanfaatkan oleh UPS/KPS akan sangat berpengaruh terhadap kinerja UPS/KPS dalam menjaga keberlanjutan penyediaan air bersih di desa setempat.

Tarif air atau harga jual air juga berpengaruh terhadap kinerja UPS/KPS. Hal ini sesuai dengan Tabel 2. tentang

penilaian responden terhadap kondisi eksisting, dimana persepsi responden hanya 3,24% yang menyatakan tarif air UPS/KPS mahal. Dengan tarif air yang rendah akan menyulitkan UPS/KPS melaksanakan operasional dan pemeliharaan yang ideal guna mewujudkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Disamping itu UPS/KPS juga sulit untuk berkembang akibat rendahnya pendapatan untuk investasi pengembangan jaringan baru.

Penetapan tarif sesuai Pasal 2(dua) Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum didasarkan pada prinsip : keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan; pemulihan biaya; efisiensi pemakaian air; transparansi dan akuntabilitas; dan perlindungan air baku. Permendagri diatas menyebutkan salah satu prinsip pengaturan tarif bertujuan agar masyarakat/konsumen efisien dalam pemakaian air, dari hasil pengamatan permasalahan kekurangan debit air dapat disebabkan oleh murahnya harga jual air, hal ini akan memicu pemakaian air bersih yang tidak terkendali padahal disisi lain ada konsumen/masyarakat di desa tersebut tidak mendapatkan air bersih. Karena ketidakadilan inilah sering memicu konflik antara pengelola dengan konsumen yang mengakibatkan menurunnya kinerja UPS/KPS.

Anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan dukungan aparat desa dinas/adat juga mempengaruhi kinerja UPS/KPS. Dengan adanya aturan tertulis yang jelas dan tegas tentang pengelolaan air bersih perdesaan yang telah disepakati bersama dan didukung oleh aparat desa dinas/adat setempat akan meningkatkan kinerja UPS/KPS. Permasalahan yang sering dihadapi UPS/KPS adalah



kekurangdisiplinan konsumen dalam membayar tagihan air, pengelola tidak dapat berbuat banyak karena belum ada aturan tertulis yang jelas atau tidak berani bertindak tegas karena tidak adanya dukungan dari aparat desa dinas/adat.

**Analisis Faktor Aspek Proses**

Berdasarkan hasil analisis faktor sesuai Tabel 3. diketahui bahwa faktor satu terbentuk dari empat komponen variabel dengan total varians sebesar 35,895%.

**Tabel 3. Hasil Analisis Faktor Aspek Proses**

No. Faktor	Komponen Faktor 1	Muatan Faktor	Eigen Value	Variance Explained	Comulative Total
Faktor 1	Kemampuan masyarakat membayar tagihan	0,888	4,666	35,895	35,895
	kemauan masyarakat membayar tagihan	0,887			
	Penyebab timbulnya masalah	0,866			
	Komitmen aparat desa	0,734			

Sumber : Hasil Analisis 2012

Dari hasil analisis faktor didapatkan faktor yang dominan dari aspek proses yang mempengaruhi kinerja terbentuk dari komponen variabel sebagai berikut :

- 1) Kemampuan masyarakat membayar tagihan
- 2) Kemauan masyarakat membayar tagihan
- 3) Penyebab timbulnya masalah
- 4) Komitmen aparat desa

Kemampuan masyarakat membayar tagihan air dan kemauan masyarakat membayar tagihan air bersih merupakan variabel yang paling dominan dalam menentukan faktor satu. Permasalahan yang dihadapi UPS/KPS memang dilematis, keinginan untuk menyesuaikan tarif sering terbentur masalah kemampuan dan kemauan masyarakat setempat untuk membayar tagihan air. Pemahaman masyarakat tentang air minum tidak mendukung pengembangan air minum, masyarakat masih beranggapan bahwa air adalah benda sosial yang tidak memerlukan biaya dalam pengelolaannya. Sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 (2) disebutkan bahwa tarif memenuhi prinsip keterjangkauan idealnya pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan. Menurut hasil survey tentang Profil Responden

diketahui bahwa prosentase tingkat pendapatan responden terbesar (38,65%) berada pada kisaran Rp.500.000 – Rp.1.000.000, maka sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 masyarakat Buleleng idealnya membayar tagihan air 4% dari Rp.750.000 (median pendapatan responden) sebesar Rp.30.000. Namun, hasil survey penilaian responden diketahui hampir 50% responden membayar tagihan air dibawah Rp. 10.000/bulan.

**Analisis Faktor Aspek Keluaran**

Hasil analisis faktor sesuai Tabel 4. diketahui bahwa faktor satu terbentuk dari empat komponen variabel dengan total varians sebesar 32,141% dan nilai *eigen* sebesar 2,571.

Kesadaran masyarakat membayar tagihan air merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja UPS/KPS dari aspek keluaran. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar tagihan air akan meningkatkan pendapatan UPS/KPS sehingga mampu memenuhi kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan yang berdampak terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat serta meningkatkan kemampuan UPS/KPS dalam investasi pengembangan wilayah pelayanan untuk menambah jumlah pelanggan.

**Tabel 4. Hasil Analisis Faktor Aspek Keluaran**

No. Faktor	Komponen Faktor 1	Muatan Faktor	Eigen Value	Variance Explained	Comulative Total
Faktor 1	Kesadaran masyarakat membayar tagihan air	0,858	2,571	32,141	32,141
	Terpenuhinya kebutuhan air masyarakat	0,835			
	Peningkatan jumlah pelanggan	0,628			
	Peningkatan kontinuitas air mengalir ke masyarakat	0,538			

Sumber : Hasil Analisis 2012

**Analisis Faktor Aspek Hasil**

Hasil analisis faktor sesuai Tabel 5. diketahui bahwa faktor satu terbentuk dari dua komponen variabel dengan total varians sebesar 52,780% dan nilai *eigen* sebesar 2,111.

Kedua variabel tersebut berkorelasi positif, hal ini bisa diartikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan akan semakin meningkat kepuasan konsumen maka semakin baik pula kinerja UPS/KPS.

**Tabel 5. Hasil Analisis Faktor Aspek Hasil**

No. Faktor	Komponen Faktor 1	Muatan Faktor	Eigen Value	Variance Explained	Comulative Total
Faktor 1	Kualitas pelayanan	0,991	2,111	52,780	52,780
	Kepuasan pelanggan	0,890			

Sumber : Hasil Analisis 2012

**Analisis Faktor Aspek Dampak Manfaat**

Hasil analisis faktor sesuai Tabel 6. diketahui bahwa faktor satu terbentuk dari tiga komponen variabel dengan total varians sebesar 67,367% dan nilai *eigen* sebesar 2,021

bantuan sarana dan prasarana air bersih dari pemerintah padahal UPS/KPS tersebut potensial untuk berkembang karena debit sumber air memadai, daftar tunggu pasang baru banyak. Apabila UPS/KPS bisa mengakses kredit pembiayaan untuk investasi tentunya akan meningkatkan kinerja UPS/KPS.

Pengelola air bersih perdesaan di Kabupaten Buleleng cenderung terpaku pada

**Tabel 6. Hasil Analisis Faktor Aspek Dampak Manfaat**

No. Faktor	Komponen Faktor 1	Muatan Faktor	Eigen Value	Variance Explained	Comulative Total
Faktor 1	Kemudahan UPS/KPS mengakses pembiayaan	0,893	2,021	67,367	67,367
	Terbentuknya UPS/KPS sehat dan handal	0,865			
	Perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat	0,685			

Sumber : Hasil Analisis 2012

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja UPS/KPS dalam menjaga keberlanjutannya sebanyak 55 faktor sesuai variabel penelitian.
2. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja UPS/KPS air bersih perdesaan di Kabupaten Buleleng dari aspek masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak-manfaat yaitu : debit sumber air; kemampuan masyarakat membayar tagihan air; kesadaran masyarakat membayar tagihan air; kualitas pelayanan; dan kemudahan UPS/KPS dalam mengakses pembiayaan

**Saran**

Beberapa hal yang kami jadikan saran yaitu:

- 1) Dalam rangka pembinaan dan penguatan kelembagaan UPS/KPS perlu dibuatkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan air bersih perdesaan yang mengatur tentang faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja UPS/KPS di Kabupaten Buleleng.
- 2) Dalam rangka peningkatan kinerja pengelola air bersih perdesaan dibutuhkan peran serta aktif dari aparat desa sebagai pembina SPAM dalam bentuk komitmen dan dukungan terhadap legalitas dan kemandirian UPS/KPS di desa setempat.
- 3) Guna menjaga keberlanjutan fungsi penyediaan air bersih masyarakat perdesaan diperlukan perubahan persepsi masyarakat bahwa air



bersih bukan lagi benda sosial yang diperoleh tanpa memerlukan biaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Roadmaps Percepatan Pencapaian Target MDGs - Bidang Keciptakaryaan*. Jakarta : Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Anonim. 2012, *Database Pengelolaan Air Bersih Kab. Buleleng Tahun 2011*. Buleleng : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng.
- Anonim. 2010. *Pelayanan Air Minum Provinsi Bali dan Program MDGs Tahun 2015*, Bali : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
- Anonim. 2010. *Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Buleleng*, Buleleng : Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Anonim. 2008. *Waspola : Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum & Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat*. Jakarta : Badan Perencana Pembangunan Nasional RI.
- Anonim. 2006. *Permendagri No.23/2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri RI.
- Anonim. 2005. *PP No.16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia.
- Anonim. 2004. *UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air*. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia.
- Mahsun, M. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Poernomo, E. 2011. "Analisis Faktor Kinerja Badan Pengelola Sarana (BPS) PAMSIMAS Kabupaten Temanggung" (tesis). Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember.